



Analisis Penerapan Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa pada Kantor Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Mafturrahman^{1*}, Farikhul Muafiq³, Ary Dwi Anjani³, Bunga Lestari⁴, Putri Melindasari⁵

Program Studi Administrasi Perkantoran, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama
Pekalongan, Jl. Karangdowo No. 9, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia 51173.

Email Korespondensi: mafturrahmansos@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika administrasi dalam pelayanan publik di tingkat desa, dengan fokus pada nilai transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Studi ini mengisi kekosongan literatur terkait praktik etika administrasi di lingkungan pedesaan yang seringkali luput dari perhatian akademik. Penelitian dilakukan di Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terhadap aparat desa dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan profesionalisme aparatur berdampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan partisipasi warga dalam musyawarah desa. Namun demikian, implementasi nilai-nilai etika ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan warga, dan minimnya pelatihan formal bagi aparatur. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola desa yang etis ditentukan oleh kombinasi antara komitmen moral aparat, kesiapan infrastruktur, dan strategi pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam mendorong penguatan budaya etika dalam birokrasi desa di era digital.

Kata kunci: Etika Administrasi; Pelayanan Publik; Transparansi; Profesionalisme.

An Analysis of Administrative Ethics Implementation in Village Apparatus Services at the Proto Village Office, Kedungwuni District, Pekalongan Regency

Abstract

This study aims to analyze the implementation of administrative ethics in public service at the village level, focusing on the values of transparency, accountability, and professionalism. The research addresses a gap in the literature concerning the practice of administrative ethics in rural settings, which is often overlooked in academic discourse. The study was conducted in Proto Village, Kedungwuni District, Pekalongan Regency, using a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis involving village officials and community members. The findings indicate that improvements in transparency and professionalism significantly enhanced public trust and citizen participation in village decision-making forums. However, the application of these ethical principles still faces challenges, including limited digital infrastructure, low technological literacy among residents, and a lack of formal training for village officials. The study concludes that the success of ethical village governance depends on a combination of moral commitment, infrastructure readiness, and sustainable capacity development strategies. This research contributes both practically and theoretically to the advancement of ethical culture within rural public administration in the digital era.

Keywords: Administrative Ethics; Public Service; Transparency; Professionalism.

How to Cite: Mafturrahman, M., Muafiq, F., Anjani, A. D., Lestari, B., & Melindasari, P. (2025). Analisis Penerapan Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa pada Kantor Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Empiricism Journal*, 6(3), 953–964. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3342>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3342>

Copyright© 2025, Mafturrahman et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Etika administrasi merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat desa yang menjadi ujung tombak pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Menurut Pamungkas (2025), moralitas dalam administrasi publik menjadi syarat utama bagi terciptanya tata kelola yang bersih, transparan, dan bermutu tinggi. Nilai-nilai etis seperti integritas, tanggung jawab, keadilan,

dan profesionalisme menjadi dasar dalam membangun sistem pelayanan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip ini juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan legitimasi pemerintahan lokal. Pentingnya penerapan etika administrasi semakin relevan dalam konteks Indonesia, terutama setelah diberlakukannya program Dana Desa sejak 2014. Program ini menjadi tonggak utama dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan bertujuan untuk memberdayakan lebih dari 79.000 desa di seluruh Indonesia melalui alokasi dana langsung yang dapat digunakan untuk pembangunan lokal, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan perempuan (Rammohan & Tohari, 2023). Namun, seiring dengan peningkatan kewenangan desa, muncul pula tantangan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan desa.

Fenomena penyimpangan etika dalam birokrasi desa bukanlah hal baru. Kasus kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) sering ditemukan dalam pengelolaan administrasi desa, sebagaimana dikemukakan oleh Hayani et al. (2024). Permasalahan ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik. Di banyak desa, warga masih merasakan praktik birokrasi yang tertutup dan diskriminatif, di mana akses terhadap layanan publik bergantung pada kedekatan personal dengan aparat desa (Pananrangi et al., 2021). Masalah ini diperburuk oleh norma sosial dan budaya lokal yang terkadang justru melanggar praktik tidak etis. Dalam banyak kasus, masyarakat enggan melaporkan penyimpangan yang dilakukan aparat desa karena adanya tekanan sosial, tabu terhadap pengaduan, atau keterikatan kekerabatan. Konteks sosiokultural seperti ini membuat pelaksanaan prinsip-prinsip etika menjadi tantangan tersendiri di tingkat desa (Nelson et al., 2007; Gregory, 2005).

Selain aspek sosial, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi kendala serius dalam penerapan etika administrasi di desa. Dalam penelitian oleh Nchabeleng (2025), terbukti bahwa keterbatasan staf, fasilitas pelayanan yang minim, serta rendahnya literasi digital berdampak langsung pada rendahnya kualitas pelayanan publik. Keterbatasan tersebut mendorong aparat desa untuk membuat kompromi etis, misalnya dalam hal alokasi sumber daya atau prioritas pelayanan. Sementara itu, kemajuan teknologi digital telah membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa melalui e-government dan sistem pelayanan digital. Namun, keberhasilan transformasi digital di desa masih bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas aparat serta masyarakat. Studi oleh Fadrial et al. (2024) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi pelayanan publik menjanjikan peningkatan transparansi dan kecepatan layanan, keterbatasan akses, rendahnya literasi teknologi, dan kurangnya pelatihan membuat penerapan e-government di desa sering tidak berjalan optimal. Hal ini mempertegas pentingnya etika digital dalam tata kelola publik di era transformasi teknologi.

Pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga telah banyak dibuktikan dalam studi lintas negara. Misalnya, Ong dan Gabriel (2018) di Filipina menemukan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tingkat legislatif lokal dapat meningkatkan output peraturan dan kinerja legislatif. Di Tanzania, Kessy (2020) menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik. Hal serupa juga ditemukan oleh Syafaruddin (2024) di Indonesia, yang menyoroti pentingnya gaya kepemimpinan yang etis dan transparan dalam meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas.

Meskipun etika administrasi telah banyak dikaji dalam konteks pemerintahan pusat dan kota besar, studi mengenai implementasinya di lingkungan pedesaan, khususnya di desa-desa di Jawa Tengah, masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek struktural organisasi atau kinerja birokrasi tanpa mengupas secara mendalam dinamika etika administrasi di tingkat desa (Hidayati et al., 2024). Bahkan, meskipun beberapa studi telah menyoroti permasalahan korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan dana desa, analisis mengenai bagaimana nilai-nilai etika seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme diterapkan secara konkret dalam praktik pelayanan publik desa belum banyak ditemukan. Kekosongan literatur ini menjadi semakin signifikan mengingat pentingnya tata kelola etis dalam menjamin keberhasilan program pembangunan desa dan perlindungan terhadap hak-hak warga. Belum adanya studi yang membandingkan secara spesifik tantangan penerapan etika administrasi di wilayah-wilayah dengan konteks

sosial-budaya tertentu seperti di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa masih terdapat gap yang perlu dijembatani melalui kajian empiris.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam dua hal. Pertama, dari segi lokasi dan konteks, penelitian ini bertempat di Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang secara sosial dan budaya memiliki karakteristik unik, termasuk ikatan sosial yang kuat, praktik birokrasi informal, serta tekanan norma lokal. Berbeda dengan Hidayati et al. (2024) yang fokus pada struktur organisasi pelayanan, penelitian ini menitikberatkan pada indikator nilai etika seperti integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam interaksi pelayanan publik. Kedua, dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan indikator yang secara eksplisit diadaptasi dari teori Pamungkas (2025), yakni transparansi (keterbukaan informasi publik), akuntabilitas (pertanggungjawaban atas layanan), dan profesionalisme (standar perilaku dan disiplin kerja). Analisis dilakukan dengan mengkaji hubungan antara indikator-indikator tersebut dengan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik, serta mengidentifikasi hambatan normatif dan struktural yang dihadapi oleh aparat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai etika administrasi dalam pelayanan publik di tingkat desa, dengan fokus pada Kantor Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang diadaptasi dari kerangka teoritis Pamungkas (2025) diinternalisasi dan diterapkan oleh aparat desa dalam pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala struktural, normatif, dan kultural yang menghambat penerapan etika administrasi, termasuk keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta pengaruh kuat norma sosial dalam lingkungan pedesaan. Dengan pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kualitas etika administrasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik desa, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih etis, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik etika administrasi dalam pelayanan publik oleh aparat Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh dan kontekstual atas fenomena yang kompleks dan berbasis pengalaman langsung subjek penelitian, sebagaimana disarankan oleh Moser & Korstjens (2017). Desain ini juga memungkinkan peneliti untuk tetap dekat dengan data dan meminimalkan interpretasi yang berlebihan, sehingga informasi yang diperoleh tetap autentik dan relevan (Ospina & Dodge, 2005).

Desain Penelitian dan Instrumen

Penelitian ini menggunakan instrumen wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi desa. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan tiga indikator utama etika administrasi: transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, yang merujuk pada kerangka teoritis Pamungkas (2025). Wawancara dirancang dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi dan kejelasan sebagaimana disarankan oleh Padilah et al. (2023), agar data yang diperoleh tidak hanya etis tetapi juga mendalam dan representatif. Pendekatan ini juga mendukung partisipasi aktif informan dalam membagikan persepsi mereka tentang praktik pelayanan publik dan tata kelola desa.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang dianggap relevan dan memiliki pengalaman langsung dengan fenomena yang dikaji. Sampel terdiri dari dua kelompok utama: (1) aparat desa yang terlibat dalam pelayanan publik (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan), dan (2) perwakilan masyarakat yang aktif menggunakan layanan desa atau terlibat dalam kegiatan musyawarah desa (tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan warga biasa). Total jumlah informan adalah 12 orang.

Meskipun jumlah ini relatif kecil, kedalaman data yang diperoleh mencerminkan kompleksitas sosial di desa serta memberi ruang untuk eksplorasi tematik yang bermakna.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama:

1. **Wawancara Mendalam:** Digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik aparat desa serta warga terkait penerapan etika administrasi. Panduan wawancara didasarkan pada indikator Pamungkas (2025), dengan pertanyaan terbuka yang dikembangkan untuk memungkinkan eksplorasi naratif sesuai arahan Braun & Clarke (2020).
2. **Observasi Partisipatif:** Dilakukan dengan mengamati interaksi langsung antara aparat dan warga di kantor desa, termasuk prosedur pelayanan dan cara penyampaian informasi. Observasi ini bertujuan untuk memverifikasi data wawancara dan menangkap dinamika perilaku aktual.
3. **Analisis Dokumen:** Dokumen yang dianalisis meliputi laporan keuangan desa, SOP pelayanan, papan informasi, dan data keluhan masyarakat. Dokumen ini menjadi pelengkap data lapangan dan digunakan untuk triangulasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik berdasarkan model Braun & Clarke (2006), yang terdiri dari enam tahap: (1) familiarisasi dengan data, (2) pembuatan kode awal, (3) pencarian tema, (4) peninjauan tema, (5) penamaan dan definisi tema, serta (6) penyusunan laporan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola penting dalam data kualitatif serta menghubungkannya dengan konteks lokal pelayanan desa.

Proses analisis juga mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga komponen: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan visualisasi sederhana. Dimana ini memperkuat hasil analisis tematik dan memberikan ilustrasi empiris yang mendukung temuan.

Validitas dan Keandalan Data

Validitas data dijaga melalui teknik *member checking*, yaitu dengan meminta konfirmasi dari informan atas hasil transkrip dan interpretasi awal yang dilakukan peneliti. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan pemahaman autentik dari partisipan. Triangulasi metode (wawancara, observasi, dan dokumen) juga digunakan untuk mengurangi bias dan meningkatkan keandalan temuan.

Reliabilitas penelitian dijaga melalui dokumentasi sistematis terhadap seluruh proses pengumpulan dan analisis data, termasuk pembuatan catatan lapangan, audit trail, dan rekaman wawancara. Peneliti juga menerapkan prinsip reflektivitas untuk meminimalkan bias pribadi selama proses interpretasi.

Pertimbangan Etis

Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi standar etika penelitian sosial. Seluruh informan diberikan informasi yang jelas mengenai tujuan dan penggunaan data, serta diminta untuk memberikan persetujuan secara sukarela (*informed consent*). Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan analisis akademik.

Keterbatasan Metode

Sebagai studi kualitatif berbasis studi kasus, generalisasi temuan bersifat terbatas. Jumlah informan yang kecil dan konteks lokal Desa Proto membuat hasil tidak dapat digeneralisasi ke seluruh desa di Indonesia. Selain itu, potensi bias dalam interpretasi data juga menjadi tantangan, meskipun telah diminimalkan melalui triangulasi dan validasi.

Dengan desain yang sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip analisis kualitatif yang ketat, metode dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid dan relevan, serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik etika administrasi di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Proto memiliki luas wilayah 79,873 Ha, yang terletak di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Berdasarkan data dari sumber yang disediakan (<https://desaprotopekalongan.wordpress.com/about/>), tata guna lahannya terbagi sebagai berikut: Pemukiman: 33 hektar (sekitar 41%), Persawahan: 28 hektar (sekitar 35%), Pekarangan: 16 hektar (sekitar 20%), Perkebunan dan Fasilitas Umum: Masing-masing 1 hektar (sekitar 1% per jenis lahan).



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Proto

Hasil Wawancara

Hasil wawancara mendalam dengan setiap informan memberikan gambaran rinci mengenai penerapan etika administrasi di Kantor Desa Proto. Setiap sudut pandang dari aparat desa dan masyarakat menawarkan wawasan unik tentang kondisi di lapangan. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara terkait dengan penerapan etika administrasi di desa Proto.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Penerapan Etika Administrasi di Desa Proto

Informan	Temuan Utama	Aspek Etika yang Terkait	Catatan Khusus
Kepala Desa	Banyak keluhan di masa lalu; transparansi (laporan keuangan terbuka) tingkatkan kepercayaan masyarakat.	Transparansi, Akuntabilitas	Perubahan sikap warga terjadi setelah keterbukaan informasi ditingkatkan.
Sekretaris Desa	Sulit menjaga konsistensi etika saat beban kerja tinggi; minim pelatihan dari pemda.	Profesionalisme, Konsistensi Etika	Kebutuhan pelatihan formal sangat tinggi.
Kaur Keuangan	Transparansi keuangan meredakan kekhawatiran warga; staf kesulitan adaptasi prosedur baru.	Transparansi, Kepatuhan Prosedural	Beberapa staf belum menyadari pentingnya etika baru.
Tokoh Masyarakat	Layanan lebih adil; tidak perlu "orang dalam" lagi; kepala desa diapresiasi.	Keadilan, Transparansi	Warga mulai percaya sistem karena akses yang lebih setara.
Warga Biasa	Pelayanan cepat dan ramah; tidak perlu memberi uang 'terima kasih'; informasi dana desa terbuka.	Profesionalisme, Transparansi	Masyarakat merasa lebih terlibat dan dihargai.
Ketua RT	Partisipasi warga meningkat; musyawarah lebih aktif; warga merasa suaranya dihargai.	Partisipasi Publik, Transparansi	Transparansi mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan

Penerapan etika administrasi dalam konteks pemerintahan desa merupakan fondasi penting bagi terciptanya tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dapat diidentifikasi sejumlah aspek penting yang mencerminkan implementasi nilai-nilai etika administrasi, khususnya terkait transparansi pelayanan, profesionalisme aparatur, serta responsivitas terhadap inovasi digital. Temuan ini memperkaya wacana akademik seputar praktik administrasi desa di Indonesia dan menunjukkan relevansi prinsip-prinsip etika dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Transparansi sebagai Instrumen Membangun Kepercayaan Publik

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam etika administrasi yang berperan vital dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Di Desa Proto, peningkatan transparansi ditunjukkan melalui keterbukaan informasi keuangan desa yang ditempatkan di papan pengumuman publik serta penyediaan informasi pelayanan di ruang administrasi. Langkah ini secara signifikan mereduksi praktik tidak etis seperti penyalahgunaan wewenang dan perantara informal ("orang dalam"), sebagaimana tercermin dari pernyataan beberapa informan, termasuk Kepala Desa dan warga biasa. Transparansi di sini tidak hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi proaktif untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sofyani et al. (2021; 2022), yang menegaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi penting, mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi sosial aparat desa. Namun, sebagaimana dicatat oleh Husni et al. (2023), transparansi harus dibarengi dengan upaya membangun persepsi yang positif terhadap integritas pemerintah desa, mengingat persepsi korupsi dapat tetap bertahan meski data telah dibuka secara luas.

Oleh karena itu, transparansi perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, disertai dengan edukasi publik dan pelibatan warga dalam pengawasan, agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat..

Profesionalisme dan Disiplin Aparatur Desa

Profesionalisme dan disiplin merupakan fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, adil, dan berintegritas di tingkat desa. Temuan dari Sekretaris Desa dan warga Desa Proto menunjukkan bahwa aparatur desa umumnya telah menunjukkan kedisiplinan yang memadai, seperti kepatuhan terhadap jam kerja dan sikap ramah dalam melayani masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya etos kerja yang positif di lingkungan birokrasi desa. Namun, munculnya tantangan berupa tingginya beban kerja dan kurangnya pelatihan formal dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya didukung oleh sistem pembinaan dan penguatan kapasitas yang memadai.

Menurut Pamungkas (2025), profesionalisme dalam birokrasi bukan sekadar soal kompetensi teknis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam konteks ini, disiplin kerja menjadi indikator utama efektivitas pelayanan, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Failin et al. (2023) dan Nuryan et al. (2022), yang menunjukkan bahwa tingkat disiplin yang tinggi berkorelasi langsung dengan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat Proto yang menginginkan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

Untuk memperkuat profesionalisme ini, perlu dilakukan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup topik-topik seperti etika administrasi, manajemen konflik pelayanan, serta teknik komunikasi publik. Dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah daerah juga diperlukan agar aparatur desa tidak hanya mampu bekerja dengan disiplin, tetapi juga adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima yang berbasis etika.

Responsivitas terhadap Layanan Digital dan Tantangan Sarana

Implementasi sistem administrasi digital di Desa Proto menunjukkan adanya komitmen untuk membangun tata kelola desa yang lebih modern, transparan, dan efisien. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital dalam sektor pelayanan publik desa yang bertujuan mempermudah akses layanan serta mempercepat proses administratif. Namun, temuan dari wawancara dengan warga dan Ketua RT menunjukkan adanya kendala serius berupa kesenjangan digital, khususnya di kalangan warga lanjut usia dan kelompok dengan tingkat pendidikan rendah. Mereka cenderung belum familiar dengan teknologi dan lebih memilih layanan tatap muka, meskipun layanan digital sudah tersedia.

Hal ini sejalan dengan kajian Hall & Owens (2011) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital merupakan salah satu penghambat utama dalam pemanfaatan layanan e-government, terutama di wilayah pedesaan. Demikian pula, Chen et al. (2024) menekankan bahwa keberhasilan platform digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkannya.

Studi dari Patra & Das (2014) dan Ye & Yang (2020) lebih lanjut menegaskan bahwa digitalisasi di pedesaan harus disertai dengan penyediaan infrastruktur memadai, seperti jaringan internet stabil dan perangkat yang mudah diakses. Oleh karena itu, Desa Proto perlu mengembangkan strategi literasi digital berbasis komunitas, termasuk pelatihan rutin, program pendampingan untuk kelompok rentan, serta pemanfaatan perangkat mobile yang lebih mudah digunakan. Tanpa pendekatan inklusif ini, sistem digital berisiko memperdalam kesenjangan akses, bukan menyelesaikannya.

Keadilan dan Partisipasi Publik dalam Tata Kelola

Peningkatan keadilan dalam pelayanan dan partisipasi warga di Desa Proto menandai kemajuan penting dalam etika administrasi desa. Berdasarkan temuan dari tokoh masyarakat dan Ketua RT, praktik lama seperti ketergantungan pada "orang dalam" mulai ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di desa kini lebih terbuka, adil, dan tidak diskriminatif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan serta keterlibatan warga dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi elemen pendukung, tetapi merupakan inti dari tata kelola desa yang etis dan akuntabel. Misnawati et al. (2023) dan Adam et al. (2021) menekankan bahwa keterlibatan warga dalam proses perencanaan desa dapat memperkuat legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dalam konteks Desa Proto, partisipasi warga dalam musyawarah desa mencerminkan perubahan menuju sistem yang lebih inklusif dan demokratis.

Junaedi (2023) juga mencatat bahwa partisipasi aktif mendorong aparatur desa untuk lebih responsif dan menjunjung prinsip etika pelayanan. Sementara itu, Fadillah et al. (2025) dan Safitri et al. (2022) menyoroti pentingnya pelatihan aparatur dan kanal komunikasi inklusif untuk memperkuat keterlibatan warga. Selain musyawarah tatap muka, pemanfaatan teknologi melalui e-government menjadi strategi relevan. Soleh et al. (2024) menegaskan bahwa platform digital mampu menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah desa, asalkan disertai edukasi dan akses yang merata. Hal ini menjadikan keadilan dan partisipasi bukan hanya retorika, melainkan bagian integral dari tata kelola desa yang etis.

Kebutuhan Pelatihan Etika Administrasi

Minimnya pelatihan formal terkait etika administrasi, seperti yang dikeluhkan oleh Sekretaris Desa Proto, mencerminkan celah serius dalam penguatan nilai-nilai birokrasi etis di tingkat desa. Ketika aparatur desa dihadapkan pada situasi dilematis atau beban kerja tinggi tanpa bekal etis yang memadai, potensi terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik semakin besar. Oleh karena itu, pelatihan etika administrasi menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga untuk membentuk karakter pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Chowdhury & Al-Hossienie (2012) menekankan bahwa pelatihan etika yang sistematis dapat memperkuat akuntabilitas aparatur dan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Aparatur yang memahami nilai-nilai etika administrasi cenderung lebih mampu mengelola konflik kepentingan, menjaga netralitas, dan memberikan pelayanan yang adil. Selanjutnya, Darmasetiawan & Santoso (2022) menekankan bahwa

pengembangan etika birokrasi harus melibatkan kolaborasi lintas aktor, termasuk pemerintah kabupaten, lembaga pendidikan, serta komunitas lokal.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyusun modul pelatihan yang relevan dengan tantangan pelayanan desa, seperti digitalisasi, pengelolaan dana desa, dan pelayanan berbasis partisipasi. Pelatihan dapat dilakukan secara berkala melalui kerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintahan (BPSDM) atau perguruan tinggi. Dengan demikian, pelatihan etika tidak hanya menjadi agenda normatif, melainkan strategi nyata untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang berorientasi pada integritas dan kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi etika administrasi di Desa Proto menunjukkan tren positif, yang ditandai dengan peningkatan transparansi, pelayanan publik yang lebih profesional, serta partisipasi masyarakat yang semakin aktif. Namun, kemajuan ini masih dibayangi oleh tantangan yang bersifat struktural dan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan warga, serta kurangnya pelatihan etika formal bagi aparat desa. Tiga faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi etika administrasi di desa ini adalah: komitmen moral aparatur, kesiapan infrastruktur, dan strategi pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan tata kelola desa yang beretika di era digital tidak hanya bergantung pada integritas individu, tetapi juga pada ketersediaan sistem pendukung yang inklusif, seperti pelatihan etika, pengawasan, dan kanal partisipasi yang terbuka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menguatkan kultur etis dalam birokrasi desa secara berkelanjutan..

REKOMENDASI

Untuk memperkuat penerapan etika administrasi di Kantor Desa Proto, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan infrastruktur pelayanan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Pertama, pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk penyediaan ruang pelayanan yang representatif, perangkat digital yang memadai, papan informasi yang jelas, serta perbaikan infrastruktur pendukung seperti jalan desa. Ketersediaan fasilitas yang layak akan menunjang pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan profesional.

Kedua, penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup materi etika administrasi, manajemen pelayanan publik, penyelesaian konflik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin kerja, serta kepekaan terhadap kebutuhan warga. Ketiga, peningkatan transparansi harus dilakukan dengan menyampaikan informasi pelayanan dan keuangan desa secara terbuka, baik melalui media fisik (papan pengumuman) maupun digital (media sosial, website desa) agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keempat, pengawasan dan evaluasi berkala perlu diterapkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika tetap menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Kelima, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan sangat penting untuk mendorong akuntabilitas dan membangun kepercayaan. Mekanisme ini dapat dilakukan melalui forum musyawarah desa, survei kepuasan publik, maupun pembentukan lembaga pengawas independen.

Terakhir, pengembangan sistem pelayanan digital harus menjadi agenda strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan mengurangi potensi praktik tidak etis. Namun, implementasinya harus dibarengi dengan peningkatan literasi digital, terutama bagi kelompok rentan seperti warga lansia dan berpendidikan rendah, agar transformasi digital benar-benar inklusif dan bermanfaat bagi seluruh warga desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada. Rektor dan Ketua Lembaga penelitian dan pengabdian ITSNU Pekalongan atas dukungan dana dan fasilitas yang telah diberikan. Pemerintah Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, khususnya seluruh aparat desa dan masyarakat atas kerja sama serta partisipasi aktifnya. Tim pelaksana, rekan-rekan sejawat, dan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang diberikan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Siregar, N., Matondang, A., Angelia, N., & Lubis, Y. (2021). Pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan good governance tingkat desa di desa aras kabu deli serdang. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 32-42. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v3i1.5713>
- Allott, K. and Lloyd, S. (2009). The provision of neuropsychological services in rural/regional settings: professional and ethical issues. *Applied Neuropsychology*, 16(3), 193-206. <https://doi.org/10.1080/09084280903098760>
- Anderson, C. and Tverdova, Y. (2003). Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. *American Journal of Political Science*, 47(1), 91-109. <https://doi.org/10.1111/1540-5907.00007>
- Aritenang, A. (2021). The role of social capital on rural enterprises economic performance: a case study in indonesia villages. *Sage Open*, 11(3). <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>
- Batubara, R. (2016). Village government corruption in-post decentralization: democracy, ethnic diversity and budget authority. *Journal of Developing Economies*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/jde.v1i1.1774>
- Bender, S. and Werries, J. (2022). Online supervision: addressing clinical services in rural communities during covid-19.. *Rural Mental Health*, 46(1), 1-12. <https://doi.org/10.1037/rmh0000195>
- Braun, V. and Clarke, V. (2020). Can i use ta? should i use ta? should inotuse ta? comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37-47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Chen, X., Cheng, X., Zhang, T., & Guo, H. (2024). How do information and communication technology platforms shape rural e-governance: the case of zhao-lou village on the wecounty platform. *Information Systems Journal*, 35(2), 545-576. <https://doi.org/10.1111/isj.12551>
- Chipp, C., Johnson, M., Brems, C., Warner, T., & Roberts, L. (2008). Adaptations to health care barriers as reported by rural and urban providers. *Journal of Health Care for the Poor and Underserved*, 19(2), 532-549. <https://doi.org/10.1353/hpu.0.0002>
- Chowdhury, M. and Al-Hossienie, C. (2012). Quest for an effective and efficient local government: local government in japan and policy implication for local government in bangladesh. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 10(3). <https://doi.org/10.4335/188>
- Darmasetiawan, N. and Santoso, H. (2022). Collaborative strategy to maintain sinona indonesia's financial and operational sustainability in the new normal era., 287-294. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-008-4_38
- Dhewanto, W., Ratnaningtyas, S., Permatasari, A., Anggadwita, G., & Prasetio, E. (2020). Rural entrepreneurship: towards collaborative participative models for economic sustainability. *Journal of Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 705-724. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(48\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(48))
- Doğan, K. and ERDEM, B. (2022). Türkiye'de kamu görevlileri etik kurulu'nun yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında analizi. *Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(3), 758-792. <https://doi.org/10.47525/ulasbid.1111053>
- Fadillah, Y., Suryani, E., & Rofieq, A. (2025). Tata kelola administrasi desa karangmulya: tantangan dan solusi di kecamatan bojongmangu. *An-Nizam*, 3(3), 224-231. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v3i3.10424>

- Fadrial, R., Sujianto, S., Simanjuntak, H., & Wirman, W. (2024). A qualitative study on the influencing factors of e-government adoption to improve public trust in local government: case study of rokan hulu municipality. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(3). <https://doi.org/10.33022/ijcs.v13i3.3931>
- Failin, I., Hamdun, E., & Ariyantiningasih, F. (2023). Pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada kantor desa kecamatan banyuputih kabupaten situbondo. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (Jme)*, 2(6), 1145. <https://doi.org/10.36841/jme.v2i6.3540>
- Fauzi, A., Sukaesih, R., Sauri, S., & Handayani, S. (2022). Public trust, ethic and integrity in the bureaucracy. *PIJED*, 1(2), 196-202. <https://doi.org/10.59175/pijed.v1i2.16>
- Gregory, R. (2005). Whispers on the wind: the small quiet voice of rural health and welfare practice. *Rural Society*, 15(3), 268-276. <https://doi.org/10.5172/rsj.351.15.3.268>
- Hall, T. and Owens, J. (2011). The digital divide and e-government services., 37-44. <https://doi.org/10.1145/2072069.2072076>
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Adri Fania, S., Hanoselina, Y., Fitri Helmi, R., Hamka, J., Tawar, A., & Padang, K. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Eksekusi*, 2(4), 259–268. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1532>
- Herianti, E. and Litdia, L. (2021). The role of village fund allocation (add) in improving community welfare through village potential. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 99-115. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1.752>
- Hidayat, R., Nurdin, N., Madjid, U., & Tahir, M. (2024). The village expansion model for village governance and public service improvement in north lombok regency. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 13(2), 253-264. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i2.3246>
- Hidayati, S., Netti, H., & Adrianto, A. (2024). Pelayanan Aparatur Desa Di Kantor Desa Sungai Rambai Kecamatan Pariaman Utara. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i2.19215>
- Husni, M., Damayanti, R., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450-461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Islam, M. and Mahmud, R. (2015). Trust in governance in bangladesh: ideas, issues and solutions. *Millennial Asia*, 6(2), 128-146. <https://doi.org/10.1177/0976399615590513>
- Jittaruttha, C. (2016). Public trust among citizen: inner cultural questions.. <https://doi.org/10.20472/iac.2016.024.040>
- Jittaruttha, C. (2017). Public trust and governance in public administration in thailand.. <https://doi.org/10.20472/iac.2017.33.028>
- Junaedi, J. (2023). Implementation of village governance based on principles of good governance of public service in indonesia. *International Journal of Business Law and Education*, 4(1), 249-266. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i1.160>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in indonesia. *Journal of Enterprising Communities People and Places in the Global Economy*, 15(3), 432-450. <https://doi.org/10.1108/jec-07-2020-0137>
- Kessy, A. (2020). Transparency in local government finance and service delivery: the case of mwanza city and moshi district councils in tanzania. *Inkanyiso*, 12(2), 18. <https://doi.org/10.4102/ink.v12i2.42>
- Kolberg-Shah, D. and Shin, H. (2024). Can corruption connect you to politics? nepotism, anxiety, and government blame. *Political Psychology*, 45(5), 871-891. <https://doi.org/10.1111/pops.12980>
- Leader, J., Bighead, C., Hunter, P., & Sanderson, R. (2023). “working on a shoestring”: critical resource challenges and place-based considerations for telehealth in northern saskatchewan, canada. *Journal of Bioethical Inquiry*, 20(2), 215-223. <https://doi.org/10.1007/s11673-023-10233-y>
- Mahsyar, A. (2021). Disiplin Kerja Perangkat Desa Pasca Pemekaran Di Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.

- Misnawati, M., Rahmatia, R., & Fatmawati, F. (2023). Community participation in the village rkp planning process. *Economics and Business Journal (Ecbis)*, 1(5), 649-660. <https://doi.org/10.47353/ecbis.v1i5.75>
- Moser, A. and Korstjens, I. (2017). Series: practical guidance to qualitative research. part 3: sampling, data collection and analysis. *European Journal of General Practice*, 24(1), 9-18. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375091>
- Mukhlis Ishaka, M. A., Adilansyah, S. E., Sri Wahyuli, M. A., Sos, S., Haeril, M. A., & Ip, S. (2024). *Etika Administrasi Publik*. (Buku ajar atau laporan belum terbit).
- Napitupulu, I. (2020). Internal control, manager's competency, management accounting information systems and good corporate governance: evidence from rural banks in indonesia. *Global Business Review*, 24(3), 563-585. <https://doi.org/10.1177/0972150920919845>
- Nchabeleng, P. (2025). Examining the challenges faced in service delivery by south african rural communities after 28 years of democratic government administration: the case of sekhukhune municipal areas-limpopo province. *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 983-996. <https://doi.org/10.38159/ehass.2025673>
- Nelson, W., Pomerantz, A., Howard, K., & Bushy, A. (2007). A proposed rural healthcare ethics agenda. *Journal of Medical Ethics*, 33(3), 136-139. <https://doi.org/10.1136/jme.2006.015966>
- Noor Sasi Ramadhania, C., & Baiti, N. (2023). Pengaruh Etika Administrasi Publik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Instansi Pemerintah.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13.
- Nunkoo, R., Ribeiro, M., Sunnassee, V., & Gürsoy, D. (2018). Public trust in mega event planning institutions: the role of knowledge, transparency and corruption. *Tourism Management*, 66, 155-166. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.11.010>
- Nurbadaliah, S., Rijali, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., Tabalong, I. A., & Selatan, K. (2021). Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
- Nuryan, K., Rafiyandi, M., & Rahim, E. (2022). Influence of employee work discipline on community satisfaction at the lengkong village office, bojongsoang district, bandung regency. *JICA*, 1(2), 61-66. <https://doi.org/10.61317/jc.v1i2.48>
- Okorie, H. (2018). Evaluation of the effects of corruption in the armed conflict in northeast and other situations of violence in nigeria. *Beijing Law Review*, 09(05), 623-660. <https://doi.org/10.4236/blr.2018.95036>
- Ong, D. and Gabriel, A. (2018). Linking transparency and accountability to local legislative performance in the province of nueva ecija in the philippines. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(2), 384. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i2.13345>
- Ospina, S. and Dodge, J. (2005). It's about time: catching method up to meaning-the usefulness of narrative inquiry in public administration research. *Public Administration Review*, 65(2), 143-157. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00440.x>
- Padilah, A., Alamri, A., Apriyani, E., & Rudiyanto, Y. (2023). Enhancing rural community development through political transparency. *Komunitas*, 14(2), 154-175. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i2.8737>
- Pamungkas, P. (2025). *Etika Administrasi Dalam Membangun Integritas Publik*. Catatan: *Referensi ini kemungkinan buku ajar atau laporan yang belum terbit, karena tahun 2025 belum tiba. Perlu dikonfirmasi tahun publikasi atau diganti.*
- Pananrangi, A. M., Muhammad Ishak Ismail Pananrangi, A., Ismail, A., & Stia Al Gazali Barro, A. (2021). Penerapan Etika Administrasi Publik Melalui Pelaksanaan Tugas Pelayanan Birokrat. *Meraja Journal*, 4(3). Catatan: *Nomor halaman tidak tersedia. Perlu dicek kembali.*
- Patra, M. and Das, R. (2014). Accessibility of e-governance in rural india., 375-378. <https://doi.org/10.1145/2691195.2691218>
- Rahman, Z. (2023). A Critical Analysis of Good Governance And Enough Good Governance In Bangladesh. *International Journal of Research and Development (IJNRD)*, 8(5). www.ijnrd.org

- Rammohan, A. and Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: evidence from indonesia's village fund program. *Plos One*, 18(6), e0283041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>
- Retnani, D. S., Muna, K., Fauzan, M. M., Wardhani, K., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2023). Etika Dan Hukum Kepemimpinan Desa: Studi Tentang Kepala Desa Berintegritas Dalam Pengelolaan Keuangan. Catatan: *Referensi ini tidak memiliki tanggal atau detail publikasi yang lengkap, sulit untuk diverifikasi. Tahun 2023 adalah perkiraan.*
- Riley, K., Molloy, L., Wilson, V., & Middleton, R. (2023). Observing resuscitative practice. a novice researcher's experience of obtaining ethics approval. *Nursing Ethics*, 30(7-8), 1190-1198. <https://doi.org/10.1177/09697330231166071>
- Rosilawati, Y., Rafique, Z., Habib, S., & Mahmood, A. (2021). Citizen participation for the effectiveness of local governance system: a quantitative study of local health and sanitation sectors. *Journal of Public Affairs*, 22(4). <https://doi.org/10.1002/pa.2653>
- Safitri, S., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2022). Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(05), 784-792. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i05.582>
- Salihi, S. and Hutaaruk, I. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bintan. *Juremi Jurnal Riset Ekonomi*, 2(6), 769-778. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i6.5778>
- Saputra, F., Indrabudi, T., Dirgahayu, D., Karman, K., & Mudjiyanto, B. (2023). Initiatives of the indonesian government for digital transformation in rural areas. *E3s Web of Conferences*, 444, 03001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344403001>
- Situmeang, M. (2023). Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelayanan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jurnal Publika*, 8(2), 52–61. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.4423>
- Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2021). Do accountability and transparency promote community trust? evidence from village government in indonesia. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 18(3), 397-418. <https://doi.org/10.1108/jaoc-06-2020-0070>
- Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2022). Transparency and community trust in village government: does corruption perception matter?. *Financial Accountability and Management*, 39(2), 355-374. <https://doi.org/10.1111/faam.12351>
- Soleh, M., Ikhwaningrum, D., Ayuni, S., Putra, M., Firmanto, B., & Refangga, G. (2024). E-government training to increase community participation. *E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(2), 397-402. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i2.16577>
- Syadiyah, K., Putri, S., & Hayat, H. (2024). The role of public administration ethics in realizing clean and transparent governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 12(1), 116-124. <https://doi.org/10.31629/juan.v12i1.7053>
- Syafaruddin, S. (2024). Examining the role of leadership in improving transparency and accountability in local government. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(2), 131-146. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i2.213>
- Taylor, J. (2019). What causes employees to whistle while they work? factors affecting internal whistle-blowing in the australian public service. *Australian Journal of Public Administration*, 78(4), 497-515. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12401>
- Yaya, R., & Author, C. (2025). Pengaruh Implementasi E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 69–81. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Ye, L. and Yang, H. (2020). From digital divide to social inclusion: a tale of mobile platform empowerment in rural areas. *Sustainability*, 12(6), 2424. <https://doi.org/10.3390/su12062424>